

Kesehatan Demokrasi Indonesia Ditopang oleh Moderasi Umat Muslim

Kamis, 16-01-2020

MUHAMMADIYAH.ID, JAKARTA – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti melihat bahwa agenda penelitian mengenai Islam di Indonesia tidak perlu dicurigai, bahkan perlu diterima secara terbuka dan kritis oleh para da'i sebagai bahan evaluasi dan pemandu langkah untuk memperkuat gerakan dakwah.

"Islam Indonesia menjadi komoditas Islam yang paling seksi. Sering menjadi objek penelitian baik dalam konteks strategis, politis maupun relasi negara lain. Awal reformasi yang dikhawatirkan (peneliti) adalah kaitan Islam dengan demokrasi, HAM, dan gender. Tapi karena terbukti Islam Indonesia tidak bermasalah, kemudian bergeser temanya kepada radikalisme," ungkapnya.

Membandingkan dengan Timur Tengah, Mu'ti menegaskan bahwa umat Islam di Indonesia memiliki kelebihan dalam sifat toleran, kerukunan dan moderasi sehingga program deradikalisasi yang selalu dialamatkan kepada muslim Indonesia dinilainya tidak tepat.

"Di Indonesia, Islam menjadi kekuatan utama demokrasi yang pelaksanaannya tidak berdarah-darah seperti yang dikhawatirkan para peneliti Barat bahwa Islam tidak akan mampu berjalan selaras dengan demokrasi seperti di Timur Tengah," ungkap Mu'ti.

Dalam diseminasi hasil penelitian "Peran Organisasi Islam Moderat dalam Menangkal Ekstrimisme Kekerasan: Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah" International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Rabu (15/1) tersebut Mu'ti mengutip peran Muhammadiyah terhadap moderasi Islam sekaligus kritik terhadap isu radikalisme.

"Daripada memakai istilah deradikalisasi, Muhammadiyah memperjuangkan penggunaan istilah moderisasi dan Wasathiyah Islam karena memiliki konstruksi teologis yang sangat banyak rujukannya. Dimulai dari Muktamar Makassar 2015, gagasan berkembang menjadi Bogor Message yang menjadi sumbangan Indonesia dalam moderasi beragama di tingkat global yang terkait dengan Amman Message. Bahkan sekarang menjadi dokumen negara sebagai bahan diplomasi," jelas Abdul Mu'ti.

Rekomendasi untuk Muhammadiyah

Bekerjasama dengan Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, diseminasi penelitian diikuti oleh para dai Muhammadiyah dan dosen AI Islam Kemuhammadiyah di wilayah Jabotabek.

Direktur Program Infid Aditiana Dewi Eridani menjelaskan NU dan Muhammadiyah dipilih sebagai objek penelitian karena paling representatif mengenai visi Islam moderat. Penelitian dilakukan dari bulan Maret 2019 hingga Agustus 2019 dengan melibatkan 133 responden di delapan kota.

Riset Infid menyoroti topik penting berupa respon, upaya, daya tahan dan tantangan Muhammadiyah dan NU dalam berhadapan dengan ekstrimisme beragama. Penelitian ditujukan untuk memetakan dukungan yang paling dibutuhkan dalam menghadapi ekstrimisme.

Dari hasil penelitian, Infid merekomendasikan empat hal bagi Muhammadiyah, yakni pertama penguatan manhaj Islam Berkemajuan di kalangan kader secara masif, sistematis dan terstruktur. Kedua, penguatan kaderisasi ulama Muhammadiyah yang teguh memegang moderasi Islam Muhammadiyah dan

mengajarkannya kepada umat.

Ketiga, memperkuat media sosial maupun media resmi Muhammadiyah dan keempat, meningkatkan kualitas para dai agar dalam menyampaikan dakwah tidak monoton dan membosankan. **(afandi)**